

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal kebangkitan nasionalisme Indonesia umumnya dikaitkan dengan akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Secara lebih spesifik, kebangkitan nasionalisme Indonesia sering dianggap bermula pada awal abad ke-20, terutama setelah diterapkannya Politik Etis (*Etische Politiek*) oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1901.¹ Kebijakan ini membawa perubahan signifikan, khususnya dalam bidang pendidikan. CT van Deventer, salah satu penggagas utama Politik Etis, menekankan bahwa pendidikan harus menjadi program sentral dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bumiputra. Melalui program pendidikan ini, lahirlah golongan elite terpelajar yang mulai menggagas wacana kemajuan dan kesadaran nasional di Hindia Belanda.²

Munculnya kaum elite terpelajar ini menjadi pendorong utama dalam perjuangan memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan kolonial Belanda. Pendidikan sebagai salah satu program utama Politik Etis tidak hanya membuka akses bagi rakyat bumiputra untuk memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan kesadaran akan ketimpangan sosial dan ketidakadilan kolonial. Dengan meningkatnya pendidikan, golongan terpelajar mulai menyadari pentingnya persatuan dan perjuangan nasional guna memperbaiki nasib rakyat serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.³

Kesadaran ini kemudian diwujudkan dalam berbagai organisasi yang muncul sebagai wadah perjuangan politik dan sosial. Budi Utomo, yang berdiri

¹ Yusuf Perdana dan Rinaldo Adi Pratama, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, (Jawa Tengah: Lakeisha 2019, p.8.

² Miftahul Habib Fachrurozi, "Politik Etis dan Bangkitnya Kesadaran Baru Pers Bumiputra", *Jurnal Bihari: Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah*, 2 (1), 2019, p.19.

³ Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), p.27.

pada Mei 1908 menjadi organisasi pertama yang bergerak dalam bidang budaya dan pendidikan, khususnya bagi penduduk Jawa dan Madura. Kemudian, pada September 1912, berdiri Indische Partij yang dipelopori oleh Douwes Dekker. Selain itu, organisasi-organisasi lain seperti Sarekat Islam dan Partai Komunis Indonesia (PKI) juga turut bermunculan, membentuk fondasi awal bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.⁴

Pada perkembangan selanjutnya, lahirlah Partai Nasional Indonesia (PNI), yang muncul sebagai salah satu kekuatan baru dalam gerakan nasionalisme Indonesia. Berawal dari *Algemeene Studie Club* sebuah kelompok studi yang didirikan oleh Soekarno di Bandung pada tahun 1925 PNI tumbuh dari wadah diskusi mahasiswa, terutama dari Technische Hogeschool (Sekolah Tinggi Teknik). Kelompok ini terinspirasi oleh organisasi serupa yang didirikan oleh Soetomo di Surabaya. Seiring waktu, *Algemeene Studie Club* berkembang dari sekadar kelompok studi menjadi organisasi dengan orientasi politik yang lebih tegas. Pada 4 Juli 1927, atas inisiatif para anggotanya, dibentuklah Perserikatan Nasional Indonesia, yang kemudian pada 1928 berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI).⁵

Berdirinya PNI tidak lepas dari situasi sosio-politik yang kompleks pada masa itu. Kegagalan pemberontakan PKI pada tahun 1926 dan pembubaran organisasi tersebut menciptakan kebutuhan akan sebuah organisasi baru yang berbeda dari pendahulunya. PNI hadir sebagai respons terhadap situasi ini dengan menawarkan pendekatan perjuangan yang lebih inklusif dan terorganisir. Dalam mencapai tujuan untuk memerdekakan Indonesia dari kolonialisme Belanda, PNI menerapkan strategi politik inklusif sebagai strategi utama. Melalui pendekatan ini, PNI bertujuan untuk melibatkan semua lapisan masyarakat, mulai dari petani,

⁴ Budiharjo, *Budi Utomo Sejarah dan Kongres Pertama di Yogyakarta 1908 Sebuah Kajian Koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta*, (Yogyakarta: Museum Benteng Vredeburg 2004), p.35.

⁵ A.A. Inten Asmariati, *Mengenang Kembali Gerakan Pni di Indonesia 1927-1931*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2019), p. 3.

buruh, hingga intelektual, tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau kelas sosial.⁶

Politik inklusif PNI tercermin dalam berbagai aktivitasnya, seperti pendidikan politik, kursus pemberantasan buta huruf, membuka taman baca, membangun koperasi, mendirikan klinik, mengadakan rapat umum, dan publikasi media. PNI menggunakan media seperti surat kabar untuk menyebarkan gagasan nasionalisme kepada semua kalangan. Dalam surat kabar tersebut, selain menyebarkan gagasannya, PNI juga mengajak rakyat untuk bersatu dalam perjuangan melawan kolonialisme.⁷

PNI bertujuan untuk mencapai kemerdekaan sepenuhnya bagi Indonesia, baik dalam ranah ekonomi maupun politik, di bawah pemerintahan yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia. PNI meyakini bahwa kemerdekaan sepenuhnya hanya dapat dicapai tanpa kerja sama dengan Belanda, dan keberhasilan perjuangan bergantung pada kerja sama dan kesatuan usaha dari rakyat Indonesia sendiri. Persatuan dan kemandirian rakyat Indonesia dianggap sebagai unsur yang paling penting.⁸

Dengan politik inklusif tersebut dan keahlian Soekarno dalam berpidato yang menyajikan bahasa yang mudah dimengerti, PNI diterima oleh kalangan rakyat kecil di Indonesia. Pengaruh kharismatik Soekarno digunakan untuk menyadarkan rakyat akan konsep Indonesia Merdeka. Hal ini menjadi salah satu faktor tumbuhnya PNI sebagai partai dengan massa yang melimpah. Hingga akhir tahun 1928 PNI sudah memiliki anggota sebanyak 2.787 orang, dan pada tahun 1929 jumlah anggotanya mencapai 10.000 orang yang tersebar di Bandung, Batavia, Surabaya, dan Yogyakarta.⁹

⁶ Tim Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), p.366.

⁷ Sartono, *Ma'loemat Kepada Ra Jat Pendoedoek Jacatra dan Sekelilingnja Dari Pengoeroes PNI Tjabang Jacatra*, 6 Januari 1930.

⁸ George Mcturnan Kahin, *Nasionalisme dan Reolusi Indonesia*, (Newyork; Vornell University Press 1952), p.125.

⁹ Surbakti, *soekarno Partai Nasional Indonesia*, diakses dari <https://surbakti10.wordpress.com/2015/09/01/pni-partai-nasional-indonesia/>

Dalam perkembangannya, PNI menjadi partai yang paling berpengaruh di masa pergerakan nasional, sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang menguat di kalangan rakyat kecil dan organisasi-organisasi lain seperti Partai Sarekat Islam (PSI), Budi Utomo, Pasundan, Sumatranen Bond, Sarekat Sumatera, dan Perhimpunan Kaum Betawi. Organisasi-organisasi ini kemudian terkumpul dalam satu wadah, yaitu Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).¹⁰

Meskipun disambut baik oleh rakyat dan organisasi pergerakan lainnya, PNI juga mendapat tantangan dan kritikan dari beberapa tokoh yang berbeda pendapat, seperti Bung Hatta dan Sutan Syahrir dari Perhimpunan Indonesia (PI). Mereka mengkritik Soekarno karena lebih menekankan kemampuan pidatonya untuk menghimpun massa dan memprovokasi rakyat melawan Belanda. Menurut Hatta dan Syahrir, perjuangan seperti itu dapat berumur pendek karena jika pemimpinnya ditangkap, anggota partai akan kehilangan keberanian. Mereka beranggapan bahwa Soekarno seharusnya lebih menekankan pada pengkaderan dan pendidikan anggota agar perjuangan dapat berlangsung dalam jangka panjang.¹¹

PNI yang bertekad dengan sifat nonkooperatif-nya, tetap bersikukuh bahwa partainya tidak mau melakukan kerja sama sedikit pun dengan pemerintah kolonial Belanda. Taktik nonkooperatif ini menekankan bahwa kemerdekaan harus diusahakan sendiri oleh bangsa Indonesia, tanpa campur tangan atau bantuan dari pihak lain. PNI hanya mengakui sistem pemerintahan yang dibentuk dari dan oleh rakyat, yang hanya mungkin dilakukan dalam negara merdeka.¹²

¹⁰ Putut Wisnu Kurniawan, "Sejarah Berdirinya Perguruan Rakyat 1928 di Jakarta", *Jurnal Historia* Volume 5, Nomor 1, Tahun 2017, p.28.

¹¹ Surat Kabar Persatoean Indonesia, *Tempo Jang Ta'dapat Dikira-Kirakan Habisnja?* Batavia: 15 Agustus 1928.

¹² Sartono Kartodirjo. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme* Jilid 2, (Jakarta: Gramedia 1990), p.14.

Gubernur Jenderal De Graef yang mengamati PNI sebagai partai yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda, melihatnya sebagai ancaman yang dapat mengganggu kekuasaannya. Untuk merespons hal tersebut, pemerintah kolonial mengerahkan polisi rahasianya untuk mengawasi setiap perkumpulan yang dilakukan oleh PNI. Apabila dipandang menyinggung dan memprovokasi rakyat untuk melawan pemerintah, mereka seketika menghentikan dan membubarkannya.¹³

Pemerintah kolonial Belanda merasa terancam oleh aktivitas Partai Nasional Indonesia (PNI) yang semakin radikal. Akibatnya, pada tanggal 29 Desember 1929, sejumlah tokoh penting PNI, termasuk Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja, dan Supriadinata, ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan makar dan mengganggu ketertiban umum. Penangkapan ini dilakukan atas dasar pasal-pasal dalam kitab undang-undang pidana kolonial yang melarang segala bentuk tindakan yang dianggap membahayakan kekuasaan kolonial.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, serta dorongan ketertarikan penulis terhadap periode sejarah pergerakan nasional yang merupakan zaman penting dalam perjuangan bangsa penulis memutuskan untuk membahas topik “*Politik Inklusif Partai Nasional Indonesia (PNI) pada Awal Kebangkitan Nasionalisme Tahun 1928-1931*”. Periode ini menandai era di mana kaum terpelajar Indonesia, baik yang tergabung dalam partai politik maupun organisasi massa, berjuang untuk mempersatukan cita-cita kebangsaan. PNI, sebagai salah satu organisasi politik terpenting dalam periode pergerakan nasional, tidak hanya menjadi simbol perjuangan kemerdekaan tetapi juga mengusung pendekatan inklusif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika pergerakan nasional serta peran PNI dalam membentuk kesadaran kebangsaan Indonesia.

¹³ John Ingleson, *Jalan ke Pengasingan*, (Jakarta: LP3ES 1988), p. 86.

¹⁴ J. Petrus Blumberger, *De Nationalistische Beweging In Nederlandsch Indie*, (Belanda: Publication Holland, 1987), p. 248

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar Belakang Berdirinya Partai Nasional Indonesia?
2. Bagaimana Strategi dan Taktik Politik Ingklusif PNI Tahun 1928-1931?
3. Bagaimana Reaksi Pemerintah Kolonial dan Dampak Politik Ingklusif PNI Tahun 1928-1931?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah terwujudnya deskripsi yang dapat menjelaskan tentang:

1. Untuk Mengetahui Latar Belakang Berdirinya Partai Nasional Indonesia
2. Untuk Mengetahui Strategi dan Taktik Politik Ingklusif PNI Tahun 1928-1931
3. Untuk Mengetahui Reaksi Pemerintah Kolonial dan Dampak Politik Inklusif PNI Tahun 1928-1931

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan sumber informasi dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan, baik dari sisi kekurangan maupun kelebihan. Sebelum melaksanakan penelitian, penulis telah melakukan kajian mendalam terhadap sejumlah karya ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan. Adapun beberapa karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Pertama Buku yang berjudul *Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965*, karya Rocamora J. Eliseo (1991) membahas perkembangan PNI dari pembentukannya kembali pada tahun 1946 hingga keruntuhannya pada 1965. Buku ini mengeksplorasi dinamika internal, peran politik, serta upaya PNI dalam mempertahankan ideologi nasionalisme pasca-kemerdekaan, termasuk persaingan dengan partai lain seperti Masyumi dan PKI. Rocamora menyoroti bagaimana PNI menggabungkan sosialisme, demokrasi, dan

nasionalisme sebagai landasan ideologisnya. Meskipun demikian, buku ini lebih berfokus pada dinamika politik pasca-kemerdekaan, sementara skripsi penulis menelaah strategi politik inklusif PNI dalam menyatukan berbagai kelompok masyarakat melalui pendidikan kader, taman baca, dan koperasi pada masa kolonial.

Kedua jurnal yang berjudul *Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936*, yang diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember 2021), menelaah peran PNI dalam memperkuat nasionalisme di Indonesia melalui pendidikan, media, serta berbagai kegiatan sosial. Jurnal ini membahas bagaimana PNI sebagai organisasi intelektual menggalang persatuan nasional melalui kursus, sekolah, bank, dan rapat umum. Jika dibandingkan jurnal ini mencakup periode yang lebih luas (1927-1936), sedangkan skripsi penulis berfokus pada masa krusial 1928-1931 dengan menyoroti strategi nonkooperatif PNI yang menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial serta membangun institusi mandiri. Dengan demikian, meskipun keduanya membahas peran PNI dalam membentuk nasionalisme, skripsi ini lebih menekankan strategi inklusif dan perlawanan nonkooperatifnya.

Ketiga jurnal yang berjudul *PNI: Organisasi Politik Radikal Soekarno Dalam Pergerakan Nasional Indonesia 1927-1931*, karya Hotman Pasaribu (2023), mengkaji peran PNI sebagai organisasi politik radikal di bawah kepemimpinan Soekarno. Jurnal ini berfokus pada kondisi politik yang melatarbelakangi pendirian PNI, strategi radikal dalam menentang kebijakan kolonial, serta peran PNI sebagai wadah baru bagi gerakan nasionalis setelah pemberontakan PKI 1926. Namun, jurnal ini tidak secara spesifik membahas bagaimana PNI menerapkan politik inklusif untuk merangkul berbagai kelompok masyarakat dalam perjuangannya. Skripsi ini lebih mendalami aspek politik inklusif PNI melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan kader, pendirian taman baca, pembentukan koperasi, dan pengorganisasian rapat umum yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, skripsi ini memberikan perspektif

yang lebih luas mengenai bagaimana PNI membangun persatuan nasional melalui pendekatan nonkooperatif.

Keempat jurnal yang berjudul *Organisasi Politik Sesudah 1926 oleh Naya Valentina dalam Heuristik*, Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 2, No. 1 (Februari 2022), mengkaji dinamika organisasi politik di Indonesia setelah Pemberontakan PKI 1926 termasuk bagaimana organisasi seperti PNI dan Perhimpunan Indonesia (PI) membangun kesadaran nasional dan merespons kebijakan kolonial. Jurnal ini menyoroti bagaimana organisasi-organisasi tersebut beradaptasi terhadap tekanan pemerintah kolonial. Jika dibandingkan, skripsi ini lebih menitikberatkan pada politik inklusif yang diterapkan PNI dalam menyatukan berbagai golongan masyarakat termasuk melalui pendidikan kader, pendirian koperasi, taman baca, serta rapat umum. Oleh karena itu, meskipun keduanya membahas gerakan nasional, jurnal ini lebih menekankan respons politik pasca-1926, sedangkan skripsi ini berfokus pada strategi inklusivitas dan perjuangan nonkooperatif PNI dalam memperkuat kesadaran politik rakyat.

Kelima jurnal yang berjudul *Pergerakan PNI Baru Menentang Ordonansi Sekolah Liar Tahun 1932-1933*, yang ditulis oleh Ilham Nur Utomo dan Sulistya Putri dalam *Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan*, Vol. 10, No. 1 (April 2023), membahas peran PNI Baru dalam menentang Ordonansi Sekolah Liar yang membatasi akses pendidikan bagi bumiputra. PNI Baru menggunakan propaganda melalui media Daulat Ra'jat, mengadakan rapat umum, serta melakukan aksi protes bersama organisasi nasionalis lainnya. Jurnal ini menyoroti peran PNI Baru dalam mempertahankan hak pendidikan sebagai bagian dari perjuangan nasionalisme. Jika dibandingkan, skripsi ini berfokus pada periode 1928-1931 dan strategi politik inklusif yang digunakan PNI untuk membangun persatuan nasional sejak awal. Perbedaan signifikan antara jurnal dan skripsi ini adalah bahwa jurnal membahas PNI Baru pasca-1931, sedangkan skripsi ini menelaah bagaimana PNI membangun basis nasionalisme melalui strategi nonkooperatif sebelum pembubarannya.

Dari berbagai literatur yang dikaji, dapat disimpulkan bahwa skripsi ini memberikan kontribusi dalam memperjelas bagaimana PNI menggunakan politik inklusif untuk memperkuat nasionalisme pada awal kebangkitannya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas dinamika politik dan ideologi PNI dalam periode yang lebih luas atau setelah tahun 1931, skripsi ini memberikan analisis mendalam tentang bagaimana PNI membangun kesadaran nasional sejak dini dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat melalui institusi pendidikan, organisasi sosial, dan kegiatan ekonomi mandiri serta menekankan sifat nonkooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda.

E. Kerangka Pemikiran

Nasionalisme berasal dari konsep "bangsa", yang merujuk pada sekelompok individu yang memiliki rasa solidaritas dan kesadaran kolektif akan identitas bersama sebagai suatu komunitas. Bangsa didefinisikan sebagai sekelompok orang yang mendiami wilayah geografis tertentu, memiliki ikatan sejarah, budaya, dan cita-cita bersama, serta beraspirasi untuk membentuk negara berdaulat. Secara etimologis, istilah nasionalisme berasal dari kata Inggris "*nationalism*" dan "*nation*", yang akarnya dapat ditelusuri hingga kata Latin "*natio*" (berasal dari "*nascor*" atau "*natus sum*"), yang berarti "*saya dilahirkan*". Dalam konteks politik, nasionalisme dipahami sebagai ideologi yang menekankan prinsip-prinsip kebebasan, persatuan, kesetaraan, dan individualitas yang menjadi landasan bagi suatu kelompok dalam mencapai tujuan politik, terutama pembentukan dan pemeliharaan negara-bangsa..¹⁵

Secara historis, nasionalisme muncul sebagai respons terhadap kekuatan imperialis Barat, terutama setelah Revolusi Prancis dengan semboyan "*liberté, égalité, fraternité*". Nasionalisme menjadi ideologi yang erat kaitannya dengan demokrasi, karena keberadaan negara-bangsa dianggap sebagai prasyarat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Dalam konteks Indonesia,

¹⁵ Utama Andri, *Nasionalisme Bahan Ajar Latsar Gol. III Angkatan Ke-37*, (Jakarta: Pusdiklat Badan Pusat Statistik 2019), p.4.

nasionalisme mulai berkembang pada awal abad ke-20, ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908, yang diakui sebagai organisasi modern pertama di Indonesia. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, dengan perayaan pertama pada tahun 1938 bersamaan dengan berdirinya Parindra. Perkembangan nasionalisme Indonesia semakin menguat setelah pertemuan *Centrale Sarekat Islam* (CSI) di Bandung pada tahun 1916 di mana tokoh seperti Tjokroaminoto menggunakan istilah "*nasional*" untuk membangun rasa persatuan di antara berbagai kelompok masyarakat di Hindia Belanda. Upaya ini bertujuan untuk mencapai tingkat nasionalisme yang mampu mendorong terbentuknya pemerintahan mandiri.¹⁶

Menurut Ramlan Surbakti, partai politik adalah perkumpulan orang-orang yang terorganisasi yang bersatu padu berdasarkan ideologi bersama, dengan tujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan alternatif yang telah mereka buat. Kebijakan-kebijakan alternatif ini muncul dari kebutuhan untuk mengakomodasi dan mewakili berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Perebutan dan retensi kekuasaan untuk pelaksanaan kebijakan-kebijakan menyeluruh ini dapat dicapai melalui pemilihan umum dan metode-metode sah lainnya.¹⁷

Dalam memahami peran partai politik, terdapat tiga teori utama yang menjelaskan asal-usul partai politik. Pertama, Teori Kelembagaan, yang menyatakan bahwa partai politik muncul sebagai hasil dari sistem parlementer awal. Kedua, Teori Situasi Historis, yang menjelaskan bahwa partai politik lahir sebagai respons terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi tertentu, seperti revolusi atau perang kemerdekaan. Ketiga, Teori Pembangunan, yang menafsirkan partai politik sebagai produk modernisasi sosial-ekonomi. Dalam konteks Indonesia, Partai Nasional Indonesia (PNI) muncul sebagai respons

¹⁶ Anggraeni Kusumawardani, *Nasionalisme*, *Buletin Psikologi*, Tahun XII, No. 2, Desember 2004, ISSN: 0854 – 7108, p. 64.

¹⁷ Ramlan Surbakti, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta; Penerbit Pt Gtasind, 1999), p.113.

terhadap situasi historis kolonialisme Belanda dan kebutuhan untuk membangun kesadaran nasional.¹⁸

Politik inklusif adalah pendekatan yang terbuka terhadap segala bentuk perbedaan, baik dalam cara berpikir maupun bentuk-bentuk kehidupan. Politik inklusif menolak segala bentuk intoleransi dan ideologi tertutup, serta mengedepankan prinsip persatuan dalam keragaman. Pijakan politik inklusif bersifat kosmik, yakni melihat kepentingan dari sudut pandang yang lebih luas, bukan hanya dari kepentingan kelompok yang sempit.

PNI pada tahun 1928-1931 menggunakan politik inklusif sebagai strategi perjuangannya untuk menghimpun massa, baik dari kalangan organisasi maupun rakyat biasa. Hal ini berhasil terwujud dengan terbentuknya Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) pada tahun 1927 yang menjadi wadah persatuan bagi berbagai organisasi pergerakan. Dalam menggalang dukungan massa, PNI menjalankan berbagai aktivitas, seperti mengadakan rapat umum yang dihadiri oleh anggota PNI dan masyarakat, mendirikan taman baca, dan membuka sekolah rakyat. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat, tetapi juga untuk membangun persatuan nasional yang inklusif.¹⁹

PNI pada tahun 1928-1931 menggunakan politik ingklusif sebagai perjuangannya untuk menghimpun masa baik dari kalangan organisasi maupun kalangan rakyat hal ini berhasil dengan terbentuknya perhimpunan pemupakatan pemupakatan kebangsaan Indonesia (PPPKI), tahun 19 dan dalam menggalang dukungan massa PNI menjalankan beberapa aktivitas sperti; rapat umum yang dihadiri oleh anggoga PNI dan masyarakat, mendirikan taman baca, dan sekolah rakyat.

¹⁸ Diakses dari <https://eprints.uny.ac.id/22291/4/4.%20bab%20ii.Pdf>. Pada 23 Februari 2024

¹⁹Reza A.A. Wattimena, *Politik Progresif Inklusif: Sebuah Teori* (Jakarta: Rumah Filsafat, 2024), p.12

Dalam perjuangannya melawan pemerintah Hindia Belanda, PNI menggunakan strategi nonkooperatif, yang mengikuti jejak perjuangan Mahatma Gandhi di India. Konsep nonkooperatif memiliki arti menolak kerja sama dengan pemerintah kolonial dalam bentuk apa pun. Taktik ini menekankan bahwa kemerdekaan harus diusahakan sendiri oleh bangsa Indonesia, tanpa campur tangan atau bantuan dari pihak kolonial. PNI menganggap bahwa kemerdekaan tidak dapat dicapai melalui kerja sama dengan penjajah.²⁰

Strategi nonkooperatif mencerminkan sikap anti-kompromi terhadap pemerintah kolonial Belanda. Konsep ini sebenarnya telah dikemukakan sejak tahun 1923 oleh Mohammad Hatta, yang menekankan pentingnya persatuan tanpa melibatkan diri dalam kerja sama dengan kolonial. PNI mengadopsi sikap ini dengan tegas, menolak berpartisipasi dalam lembaga-lembaga kolonial seperti *Volksraad* (Dewan Rakyat), dan lebih memilih untuk membangun institusi mandiri, seperti koperasi, sekolah, dan klinik kesehatan.²¹

Politik inklusif dan strategi nonkooperatif yang diusung oleh PNI memiliki dampak signifikan terhadap perjuangan nasionalisme Indonesia. Melalui pendekatan inklusif, PNI berhasil menyatukan berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemuda, perempuan, petani, dan buruh, dalam perjuangan melawan kolonialisme. Sementara itu, strategi nonkooperatif memperkuat kemandirian perjuangan nasional dengan menolak ketergantungan pada pemerintah kolonial. Kedua strategi ini menjadi landasan penting bagi terbentuknya persatuan nasional dan meningkatnya kesadaran politik rakyat.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, karena objek yang akan diteliti adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu atau lampau yaitu pada tahun 1928-1931. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk

²⁰ Pudjiharono, *Gerakan Nasional Indonesia Sekitar Th 1927*, (Thesis, Institut Eguruan dan Ilmu Pendidikan Jogjakarta), p.27.

²¹ Fitri Nurjiha Dkk, "Sikap Non-Kooperatif dan Marhaenisme dalam Partai Nasional Indonesia", *Jurnal Inovasi Pendidikan*, Volume 7, Nomor 4, Tahun 2024, p 24

merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif melalui metode penelitian sejarah dengan empat tahap penelitian di antaranya Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi.

1. Heuristik merupakan suatu langkah dalam penelitian sejarah, yaitu kegiatan atau proses pengumpulan sumber sejarah. Dalam langkah Heuristik ini dilakukan pengumpulan sumber data sebanyak-banyaknya yang masih dalam cakupan tema dan permasalahan yang akan diteliti. Sumber data terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh melalui studi dokumen atau arsip statis dan Sedangkan sumber sekunder diperoleh melalui studi pustaka (*library research*).²²

a) Studi Bahan Dokumen Atau Arsip Statis

Dokumen yang akan digunakan oleh penulis adalah dokumen-dokumen arsip statis berupa surat kabar Persatoean Indonesia yang terbit di Batavia (Sekarang Jakarta) pada tanggal 15 Juli Tahun 1928-1931. Surat kabar asing berbahasa Belanda dan foto-foto kegiatan saat para tokoh PNI rapat maupun ketika memberikan pidato yang sekarang tersimpan di Perpustakaan Nasional, delpher.nl dan di website Leiden University Libraries.

b) Studi Pustaka

Sebagai pendukung dan pelengkap sekaligus kerangka dasar teori, maka penelitian ini menggunakan sumber-sumber pustaka berupa buku-buku karya ilmiah atau buku pengetahuan. Beberapa buku yang dijadikan sebagai acuan diperoleh dari Perpustakaan Nasional Indonesia, Perpustakaan Kampus UIN SMH Banten, Perpustakaan Daerah Proinsi Banten, E Book, Jurnal dan buku koleksi pribadi. Adapun daftar bukunya adalah sebagai berikut: J. Petrus Blumberger, *De Nationalistische Beweging In Nederlandsche Indie*, Belanda: Publication Holland, 1987. Jhon Ingleson, *Jalan Ke Pengasingan*,

²² Dien Madjid, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar (Edisi Pertama)* (Jakarta: Prenada Media, 2014), p. 219.

Jakarta: LP3S Anggoga IKPI 1988. Sartono Kartodirjo, *Sejarah Pergerakan Nasional Indoensia Baru Jilid II*, Jakarta: Gramedia 1990. Tim Nasional Penulis Sejarah Indonesia, *Sejarah Bangsa Indonesia Jilid V*, Jakarta: Balai Pustaka 2008. Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*, Jakarta: Gunung Agung, 1966.

2. Verifikasi (Kritik Sumber)

Langkah selanjutnya setelah memperoleh sumber-sumber penulisan sejarah yang dibutuhkan dalam penelitian ialah verifikasi keabsahan sumber sejarah atau kritik sejarah. Kritik sumber merupakan usaha mengolah dan menyaring sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Melalui upaya verifikasi data, peneliti memilih dan memilah data-data yang sungguh-sungguh relevan dengan penelitian ini untuk kemudian dijadikan sumber data untuk mendukung penelitian ini, sedangkan data lain yang kurang relevan tidak digunakan sebagai sumber.²³

Menurut I Gde Widja, kritik sumber dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu, kritik ekstern dan intern.²⁴ Kritik ekstern berkaitan dengan autensitas atau keaslian sumber sejarah. Kritik bertujuan untuk menganalisis apakah sumber- sumber yang diperoleh merupakan sumber asli atau hanya sumber turunan. Kritik ekstern juga berupaya meneliti utuh atau tidaknya sumber-sumber yang diperoleh. Kritik ekstern pada umumnya meneliti sumber-sumber sejarah berdasarkan gaya tulisan, bahasa, warna kertas, serta bentuk dan jenis kertas dokumen, arsip, dan sebagainya yang dijadikan sumber sejarah.

Sedangkan kritik intern berkaitan dengan kredibilitas sumber sejarah. Kritik intern dilakukan untuk memastikan bahwa sumber diperoleh memang merupakan sumber yang dicari. Kritik intern dilakukan untuk

²³ Muhamad Nandang Sunandar, *Pengantar Historiografi* (Serang: Media Madani, 2021), p. 65.

²⁴ I Gede Widja, *Sejarah Lokal: Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1989), p. 24.

membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan suatu sumber dapat dipercaya. Kritik intern dapat ditempuh dengan mengadakan penelitian intrinsik terhadap sumber-sumber yang didapatkan dan membandingkan data dari berbagai sumber.

3. Interpretasi (analisis Sumber)

Tahapan Interpretasi dilakukan untuk menafsirkan informasi yang saling berhubungan secara kronologis dengan fakta-fakta yang diperoleh dan telah lulus kritik. Interpretasi ini juga digunakan untuk menganalisis fakta yang digunakan. Analisis data merupakan suatu proses pencarian dan perancangan sistematis semua fakta yang terkumpul agar diketahui makna yang telah ditemukan dan disajikan secara bebas.²⁵

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Artinya, data-data yang terkumpul selanjutnya diintegrasikan atau ditafsirkan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisis yang mendasarkan sebab akibat dari suatu permasalahan atau fenomena historis yang dimaksudkan agar penelitian ini tidak hanya menjawab apa, kapan, dan di mana, tetapi juga mampu menjelaskan gejala-gejala sejarah sebagai kausalitas. Hasil analisis ini kemudian disajikan dalam bentuk penulisan diskriptif analitis.

4. Historiografi (Penulisan)

Penulisan merupakan tahapan terakhir dalam Metodologi Penelitian Sejarah. Penulisan merupakan kegiatan menyusun fakta-fakta menjadi sejarah, setelah melakukan pencarian sumber, kritik sumber dan penafsiran kemudian dituangkan menjadi suatu kisah sejarah dalam bentuk tulisan. Aspek kronologi merupakan bagian yang sangat penting dalam penulisan sejarah. Penyajian penelitian dalam bentuk tulisan mempunyai tiga bagian: (1) Pengantar, (2) Hasil Penelitian, dan (3) Simpulan.²⁶

²⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Benteng Pustaka 1995), p. 101.

²⁶ Madjid dan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar* (Edisi Pertama) p.231.

G. Sitematika Penulisan

Berdasarkan pedoman pembuatan karya ilmiah pembahasan ini akan disistematiskan menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama: Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sitematika Penulisan.

Bab Kedua: Politik Etis Dan Munculnya Kesadaran Nasional, Terbentuknya Partai Nasional Indonesia (PNI), Tokoh-Tokoh Penting Dibalik Pembentukan PNI.

Bab Ketiga: Konsep Politik Ingklusif dalam Gerakan PNI, Aktivitas-Aktivitas Politik Inklusif, Peran Media dan Publikasi

Bab Keempat: Tindakan Represif dan Penangkapan Terhadap Pemimpin-pemimpin PNI, Terbentuknya Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, Dinamika Pergerakan Nasional Pasca Pembubaran PNI